ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 8, Nomor 3, Oktober 2019: 262 - 278
DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v8i3.817

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

JARINGAN KEPEMIMPINAN ELIT POLITIK DALAM TRANSFORMASI NILAI – NILAI BUDAYA KESULTANAN BUTON *SARAPATAANGUNA* DI MASYARAKAT AGRARIS KABUPATEN BUTON

POLITICAL ELITE'S LEADERSHIP NETWORK IN THE TRANSFORMATION OF KASULTANAN BUTON'S SARAPATAANGUNA CULTURAL VALUES IN AGRARIAN COMMUNITY IN BUTON REGENCY

La Ode Muhammad Syahartijan[1], Eka Suaib[2], Bahtiar[3]
Muhammad Najib Husain[4]

[1,2,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,
Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
[*]Email korespondensi: syahartijanlaode@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan komunikasi yang dilakukan oleh elit politik dalam revitalisasi nilai – nilai budaya kesultanan Buton sarapataanguna di masyarakat agraris kabupaten Buton. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah: Bupati, anggota DPR, penyuluh dinas pertanian, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Seksi Kebudayaan dan Cagar Alam, Tokoh Adat, Tokoh Sejarah, Tokoh Pemuda, Petani dan Akademisi yang ditetapkan secara *purposive* dengan menetapkan sampel wilayah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Tahapan analisis data dilakukan, sebelum dilapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan melalui domain analysis dan taxsonomi analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tersebarnya tranformasi nilai – nilai budaya sarapataanguna dimasyarakat dilakukan oleh elit politk melalui jaringan linkaran yang ada di lembaga formal dan non formal serta jaringan keluarga melalui komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.

Kata kunci: jaringan, komunikasi, tranformasi, nilai budaya, *sarapataanguna*, Kesultanan Buton.

ABSTRACT

This research aimed to analyze communication network conducted by political elite in the revitalization of Kasultanan Buton's sarapaatanguna cultural values in agrarian community in Buton Regency. This study was a descriptive qualitative research. The informant of research consisted of Regent, members of Legislative Assembly, Agricultural Extension Officer, Chairperson of Tourism Office, Chairperson of Culture and Natural Pledge Section, customary figure, historical figure, youth figure, farmer, and academician, selected purposively by determining regional sample. Data collection was conducted using observation, interview, Focus Group Discussion (FGD), and documentation study. Data analysis stage was conducted before, during, and after fieldwork through domain and taxonomic analyses. The result of research showed that the distribution of sarapataanguna

cultural value transformation within society was carried out by political elite through cycle network existing in formal and non-formal institutions and family network through interpersonal communication, group communication, and mass communication.

***Keywords**: network, communication, transformation, cultural value, sarapataanguna, Kesultanan Buton*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan elit politik dewasa ini selalu mengalami pergeseran sesuai dengan irama dan perkembangan sistem politik suatu bangsa. Dalam perspektif kepemimpinan elit di Indonesia sangat ditentukan pergantian periodesasi sistem ketatanegaraan yang berlaku. Negara federal dengan sistem parlementar, negara republik dengan sistem presedensil merupakan proses perjalanan sejarah sistem politik yang berlaku saat itu. Permasalahan-permasalahan terus terjadi dengan segala konsekuensi sampai pada titik puncak jatuhnya rezim orde baru. Tahun 1998 Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah sistem politik melalui sistem demokrasi langsung. Namun sampai saat ini, negara Indonesia sedang mengalami krisis multi dimensi seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan kepemimpinan. Akhir akhir ini keper-cayaan masyarakat terhadap sebagian besar pemimpin mulai menurun. Banyak-nya kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat negara baik di pusat maupun didaerah mengindikasikan bahwa pemimpin kita telah terdegrasi moral dalam menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat kehilangan figur pemimpin yang ideal yang menjadi teladan dalam menyelenggarakan kepemimpinan pemerintahan, baik di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan yang telah meruntuhkan figur pemimpin teladan di lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pergesekan kepentingan-kepentingan elit dan penguasa untuk memperebutkan pengaruh dimasyarakat telah menimbulkan pengkotak-kotakan wilayah-wilayah basis setiap elit. Strategi komunikasi elit politik dengan menggunakan simbol-simbol tertentu dirasakan sangat efektif untuk mendapatkan dukungan massa dengan pendekatan kultur budaya, regional *proximity*, kesamaan etnis hingga terbentuk kekuatan akan perubahan elit politik putra daerah dan bukan putra daerah dengan penonjolan identitas diri. Semanagat otonomi daerah telah disalahtafsirkan oleh sebahagian elit untuk mendapatkan kue-kue kekuasaan yang berdampak perebutan kekuasaan.

Otonomi daerah yang telah mendapatkan ruang yang seluas-luasnya untuk menata daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat, dimaksudkan agar para elit/ pemimpin daerah secara otonom mengelolah dan mempercepat pembangunan di daerah, yang tidak menutup kemungkinan akan lahirnya daerah-daerah otonom baru. Akan tetapi sangat ironi ditengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini yang seharusnya pemerintah daerah mengikuti irama perkembangan dunia global sebagai konsequensi masuknya era informasi dan teknologi zaman Industri 4.0. Tetapi fakta dilapangan masyarakat masih saja termarginal dari sudut pembangunan tanpa terkecuali masyarakat agraris di Kabupaten Buton

Elit politik dalam konteks usaha memperoleh kekuasaan, tiba-tiba merasa tidak memiliki jarak dengan masyarakat agraris, terutama kelompok kelompok

masyarakat agraris bahkan warga miskin sekalipun. Para elit politk dengan serta merta berpihak kepada mereka agar tidak termarginalkan oleh struktur sosial, ekonomi dan politik. Dengan menggunakan simbol simbol budaya yang ada dimasyarakat tertentu merupakan strategi jitu untuk mendapatkan lumbung suara atau dukungan kekuasaan dari kaum petani dan keluarganya dengan ideologi politik untuk pembentukan identitas diri, bahwa saya adalah bagian dari kalian. Rupa-rupanya isu-isu semacam ini merupakan langkah maju bagi para elit untuk membongkar pertahanan masyarakat tentang suatu nilai yang telah mereka pegang sebagai wujud solidaritas masyarakat pedesaan yang sangat kental dengan suasana keke-rabatan (Koentjaraningrat,1985). Masyarakat dikontruksikan sebagai suatu kekuatan politik untuk mendukung elit tertentu dengan memunculkan nilai-nilai etnisitas dalam suatu ivent atau perhelatan pesta demokrasi baik dalam pilpres, pilgub, pilkada, pilcaleg ataupun pilkades sebagai mesin politik untuk memenagkan suatu pertarungan.

Dengan melihat fenomena politik budaya dalam komunikasi politik yang berkembang saat ini, maka menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti tentang kepemimpinan elit politik dalam transformasi nilai-nilai kesultanan Buton oleh masyarakat di Kabupaten Buton.

Keinginan elit politik untuk mentransformasi kembali nilai-nilai masa lalu dalam budaya kesultanan Buton didasari suatu pemikiran telah terjadi degradasi nilai-nilai budaya didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga niat untuk menstranformasi nilai-nilai budaya Buton yang menjadi pangutan dalam negara kesultanan Buton dimasa yang silam.

Aktualisasi perilaku elit yang beroreantasi pada kebudayaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal *(local wisdom)* sangat diperlukan untuk mengatasi krisis moral yang menimpa negeri ini, khususnya di Kabupaten Buton. Untuk mengefektifkan nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis didalam masyarakat, maka pola-pola komunikasi didalam masyarakat seyogianya tetap terpelihara dengan baik. Peran komunikasi didalam keluarga untuk menanamkan nilai budaya dan agama tetap harus terbina agar internasilisasi budaya melekat pada diri seorang anak.

Demikian pula komunikasi politik yang ada dalam sistem birokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Buton berupa program-program dan regulasi harus bersentuhan dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Bagea (2016) yang melihat implementasi nilai-nilai budaya kesultanan Buton masih sangat kuat untuk diteladani di Kota Baubau. Budaya malu melalui ungkapan *pomae-maeka,* artinya malu melakukan hal yang tercela seperti KKN, budaya saling memelihara melalui ungkapan *popia-piara* budaya saling menyayangi melaui ungkapan *pomaa-maasiaka* dan budaya saling menghargai melalui ungkapan *poangka-angkataka,* sehingga tercipta suasana harmonis, aman, tentram dan damai.

Meskipun status kesultanan Buton telah berakhir bersamaan dengan beralihnya status dan sistem pemerintahan dan terakhir beralih ke dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, namun nilai-nilai budaya *sarapatanguna* tersebut masih tetap hidup dalam masyarakat dan tetap menjadi pedoman dan panduan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berpemerintahan, dan berketuhanan.

Thamrin (2015) mendefinisikan *Sarapataanguna berasal d*ari bahasa Wolio Buton terdiri dari tiga kata yaitu *sara* berarti norma, nilai, aturan, hukum, atau dapat juga berarti pemerintah yang

memperoleh mandat dari rakyatnya untuk menjalankan aturan, menegakkan hukum dan undang-undang. *Pata* berarti empat, *angu* artinya buah, macam, jenis, unsur, satuan dan sebagainya, serta akhiran *na* sebagai kata petunjuk. *Patanguna* berarti yang empat buah, macam, unsur. Jadi *sarapatanguna* dapat diartikan norma, aturan yang empat (unsur, buah, macam, jenis, dan lain-lain). Norma, nilai yang empat yang harus dipatuhi, dipedomani, oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berketuhanan.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, *sarapatanguna* terdiri dari dua bagian yaitu *sarapa-tanguna* bagian pertama yang mengusung filsafat "*binci-binciki-kuli*" yang mengandung prinsip-prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini kemudian melebur ke dalam empat nilai dasar yang lainnya yaitu: *po-mae-maayaka, po-maa-maa-siaka, po-pia-pira po-angka-ang-kataka* dengan nilai *binciki-binciki-kuli.* Sedangkan *sarapataanguna* bagian kedua meliputi : *yinda-yindamo arataa soma-namo karo, yinda-yindamo karo soma-namo lipu, yinda-yindamo lipu soma-namo sara, yinda-yindamo sara soma-namo agama,* yang mengusung filsafat "*poromu yinda saangu, pogaa yinda koolota"* (Undang–Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton)

Jaringan kekuatan elit politik di zaman kesultanan sangat nampak dimana jabatan Sultan, *Sapati, Kenepulu*, *Kapitan Laut* dan *Bobato* diwilayah *kadie* dijabat oleh elit politik *bangsawan (kaomu)* sedangkan 72 menteri yang ada di *Kadie* dan sembilan menteri yang disebut *siolimbona* dijabat oleh golongan elit politik *non bangsawan (walaka)* (Syahartijan, 2012). Pembagian ini sudah diatur dalam undang-undang kesultanan Buton sejak zaman kesultanan dimasa sultan ke empat La Elangi di abad ke 17 (1597-1631 M) yang bergelar sultan Dayanu Iksannuddin melalui Undang-Undang *Martabat Tujuh* kesultanan Buton.

Kekuatan elit politik saat itu dibentuk melalui tiga sayap yang disebut *Kamboruboru Talupalenna*. Sayap pertama dari keturunan Sultan Dayanu Iksannuddin yakni *Tanailandu*. Sayap kedua dari keturunan *Sapati* La Singgah yakni *Tapi-Tapi*. Sayap ketiga dari keturunan *Kenepulu* La Bula yakni *Kumbeweha*. Dari sinilah lahirnya kekuatan elit politik *bangsawan (La Ode)* sampai berakhir masa kesultanan pada Sultan Ke 38 La Ode Falihi pada tahun 1960. Walaupun kekuatan elit politik saat itu melalui tiga sayap tersebut diatas, namun dalam pemilihan kepala negara (Sultan) tidak secara otoriter diterapkan, tetapi pelaksanaanya melalui mekanisme demokrasi pemilihan, yang jauh berbeda seperti di wilayah kesultanan di nusantara yaitu melalui warisan sehingga ketika masa jabatan Sultan berakhir maka akan diteruskan oleh anak dan keturunanya.

Kepemimpinan Sultan sebagai elit politik di pilih oleh melalui dewan *Siolimbona* dengan mengajukan nama nama calon sultan yang ada di pusat kesultanan dan yang berada di *Kadie* dan *Barata.*Setelah pengusulan maka *dewan siolimbona* melakukan musyawarah dengan *Bon-tooegena* atau menteri besar untuk menetapkan calon calon Sultan yang diserahkan kepada *bisa* atau dukun kerajaan untuk dilakukan penetapan melalui suatu mekanisme adat yang disebut *afalia* atau undian dengan menggunakan Al-quran untuk men-dapatkan petujuk dari Allah SWT , sehingga siapapun Sultan yang terpilih bahwa dialah yang mendapat restu dari Allah yang Maha Kuasa.

Sistem budaya politik Buton memiliki aturan-aturan normatif yang diatur dalam undang-undang Martabat Tujuh kesultanan yang telah diatur dalam buku Istiadatul Majmuua sebagai sistem

adat-istiadat di kesultanan Buton. Secara normatif maupun secara pragmatik sistem kesultanan Buton terbangun oleh struktur yang sudah terpola dalam sistem aturan (*syarana*) sebagai suatu bentuk sistem politik beserta stuktur kekeuasaanya. Bertolak dari sistem stratifikasi masyarakat di Kesultanan Buton yang terdiri atas empat golongan masyarakat yakni golongan kaomu (bangsawan) yang berhak menjadi sultan, golongan walaka (bangsawan yang berhak menjadi dewan syara) tinggal di kampung Melai, Baluwu, dan Kabumbu, golongan papara (golongan masyarakat umum) tinggal diseluruh pelosok kesultanan Buton. Kelompok terbawa adalah golongan batua (budak) juga tinggal diseluruh pelosok negeri Buton.

Kekuatan elit politik lokal saat ini sudah mengalami pergeseran seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Perbenturan nilai, mengakibatkan elit politik lokal tidak lagi mendapatkan tempat istimewa dalam mekanisme lahirnya pemimpin dibekas daerah kesultanan, tetapi melalui persaingan dengan elit-elit politik moderen yang mempunyai rasionalisme yang tinggi melalui status pendidikan, status ekonomi maupun tingkat kepopuleran. Sehingga kalau kita melihat fakta-fakta empiris seperti di Baubau dan kabupaten Buton pemimpin-pemimpin yang muncul saat ini adalah elit-elit politik moderen .

Dari fenomena-fenomena tersebut diatas sejalan dengan pemikiran Suzan Keller (1995: 28) dalam melihat pergerakaan elit-elit politik di tingkat lokal, bahwa masyarakat akan diperhadapkan lahirnya elit-elit baru untuk menandingi elit-elit tradisional baik itu elit karena disebabkan tingkat pendidikan, kecerdasan, ekonomi, ataupun elit dengan tingkat kepopuleran didalam masyarakat.

Menjadi sangat ironi ditengah melemahnya kekuatan elit lokal sekarang ini diwilayah bekas kesultanan Buton dimunculkan kembali suatu lembaga kesultanan dengan ditetapkanya Sultan ke 39 dan Sultan yang ke-40 yang ingin mewariskan kembali kelembagaan kesultanan Buton. Strategi komunikasi politik yang dibangun oleh elit lokal telah membongkar pertahanan elit penguasa yakni, dengan diperbolehkanya lembaga kesultanan berdiri. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk menghidupkan kembali lembaga kesultanan Buton khususnya yang berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang muncul apakah lembaga ini terbentuk berdasarkan mekanisme *sara* atau dewan adat seperti zaman kesultanan dulu atau mengalami perubahan pola-pola rekruitmen pemimpin.

Komunikasi politik di zaman kesultanan di tandai dengan simbol-sombol budaya dan religi. Hal tersebut nampak ketika suatu aturan atau hal -hal yang menyangkut kepentingan umum selalu di bicarakan di baruga, dimana baruga tersebut selalu berdekatan dengan masjid. Ini menandakan bahwa ketika suatu pembahasan mengalami *deadlock* maka para peserta rapat menuju ke masjid untuk melaksanakan shalat dan meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pembahasan dalam rapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Dalam proses rekruitmen pemimpin, adalah menonjolkan kopetensi spiritual yang berbasis tasawuf, kemudian dilanjutkan dengan kompotensi sosial yang berbasis pada jiwa persatuan. Kopotensi ini tampak dalam falsafah hidup kesultanan "*pobinci-binciki kuli*" Semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak asasi yang sama. Kemudian konsep ini dijabarkan dalam makna: Pertama, *pomae-maeka* (saling menghargai antara sesama anggota masyarakat) hal ini berarti bahwa seluruh anggota masya-

rakat harus saling takut satu dengan lainya. Yang muda takut kepada yang tua dan yang kuat takut, takut pula sama yang lemah. Rasa takut yang bersifat timbal balik ini menunjukan bahwa setiap orang diakui hak-hak asasinya, harga diri, kehormatan, perasaan, harta benda dan keluarga dan lain-lain yang wajib dipelihara, dipertahankan dan dilindungi sehingga tercipta suasana aman dan damai. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib merasa takut untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain.

Kedua, *pomaa-maasiaka* (saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat). Artinya antara sesama anggota masyarakat harus saling sayang menyayangi secara timbal balik. Orang tua harus menyayangi yang muda dan yang muda harus pula menyayangi yang tua, demikian pula yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin, antara yang kuat dan yang lemah. Dengan demikian akan tercipta perilaku tolong menolong dan gotong royong dalam hidup mereka; (3) *popia-piara* (saling memelihara antar sesama anggota masyarakat). Hal ini berarti bahwa antara anggota masyarakat berkewajiban saling memelihara, saling melindungi baik moril maupun materil termasuk kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Ketiga, *poangka-angkataka* (saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat). Hal ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat yang telah memberikan dharma baktinya bagi masyarakat umum atau suka mendermakan harta kekayaanya bagi kepentingan umum, wajiblah diberikan penghargaan yang sesuai dengan dharma baktinya tersebut.

Dengan adanya falsafah tersebut maka dikemaslah dalam bahasa menggugah jiwa dan semangat untuk berjuang dan berkorban sebagai berikut: (1) *bolimo arata somanamo karo* (janganlah harta yang penting diri); (2) *bolimo karo somanamo lipu* (janganlah diri, yang penting negeri); (3) *bolimo Lipu somamanamo sara* (janganlah negeri yang penting pemerintah); (4) *bolimo sara somanamo agama* (janganlah pemerintah yang penting agama).

Hal ini mengandung makna sebagai berikut: *Bolimo arataa somanamo karo* maksudnya mendahulukan kepentingan diri dari pada harta. Semua harta baik pemilikan perorangan, kelompok maupun milik negara wajib dijaga. Namun demikian harta tersebut dapat saja dikorbankan demi untuk melindungi hal yang lebih penting, yaitu *karo* atau diri manusia, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Contoh pada saat pembangunan benteng keraton rakyat diminta mengorbankan hartanya untuk keperluan pembangunan benteng ter-sebut.

Bolimo Karo Somanamo Lipu, berarti bahwa setiap orang siap untuk mengorbankan dirinya demi untuk mempertahankan Negara. Di sini berarti pula kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi. Setiap orang wajib mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadinya. Contohnya setiap orang harus berperang bila musuh telah mengancam Negara.

Bolimo lipu somanamo sara, Maksudnya bila musuh terlalu kuat, dapat saja bala tentara mundur dan wilayah-wilayah kesultanan dikuasai musuh, tetapi yang terpenting pemerintah harus tetap ada dan dipertahankan, karena dengan tetap adanya pemerintahan berarti kemungkinan untuk menyusun kekuatan dan menyerang kembali lawan agar dapat memperoleh kemenangan, masih tetap ada peluangnya.

Bolimo sara somanamo agama, maksudnya kalau pemerintahan tidak bisa lagi dipertahankan, bolehlah dikorbankan yang penting keyakinan kita pada agama dalam hal ini agama islam haruslah tetap sampai akhir hayat.

Transformasi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* di Kabupaten Buton adalah merujuk pada figur kepemimpinan yang lakonkan oleh elit di zaman kesultanan mulai dari Sultan, *Sapati*, *Kenepulu* dan pejabat-pejabat kesultanan lainya sampai pada tingkat *Kadie* dan *Barata*, sehingga dengan demikian para elit dapat mencontoi nilai-nilai kepemimpinan masa lalu sehinggga terjadi kehidupan yang lebih harmonis antara rakyat dengan pemimpinya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ali Mazi pada tanggal tanggal 22 Juli 219 di Kendari dalam acara seminar nasional, bahwa pemimpin saat ini perlu mencontohi para pahlawan terdahulu mereka rela mengorbankan jiwa ,raga dan harta mereka demi kemaslahatan orang yang lebih banyak.

Kesultanan Buton sebagai suatu negara yang pernah mencapai puncak kejayaan dan keemasaan di abad ke 17 dengan menerapakan undang–undang hukum islam secara murni dan konsekuen melalui konsep *Martabat Tujuh.* Periode kepemimpinan tersebut dapat bertahan kurang lebih empat abad lamanya dengan 38 periodesasi kepemimpinan kesultanan.

Fenomena yang terjadi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* menjadi tergerus arus globalisasi dan terabaikan di masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh La Ode Izat Man Arfa Sultan Buton ke 40 dalam suatu wawancara di Kendari tanggal 22 Juli 2019, bahwa dengan nilai kekinian generasi kita mulai melupakan nilai nilai luhur *sarapataanguna.* Orang – orang Buton mulai memikirkan kehidupannya diri sendiri dengan tidak mau lagi memperhatikan kehidupan orang banyak atau dikenal dengan istilah *sumbe-sumbere* (mementingkan diri sendiri*).* Padahal nilai-nilai *sarapa-taanguna* khususnya pada nilai *poma-maasiaka* saling menyayangi antar sesama sangat baik untuk diterapakan dalam era globalisasi ini. Disinilah diperlukan peranan kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai budaya lokal guna mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Buton, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaringan komunikasi kepemimpinan elit politik dalam transformasi nilai-nilai budaya s*arapa-tanguna* di masyarakat agraris kabupaten Buton.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kulitatif. Penelitian diskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian deskriptif Arikunto: (2005), adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu fenomena yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, kondisi, pendapat yang berkembang, efek yang terjadi. Fenomena disajikan secara apa adanya. Hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian. Metode kualitatif menekankan pada pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam pada informan. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji bentuk dan jaringan serta model komunikasi dalam transformasi nilai-nilai budaya kesultanan Buton *Sarapataanguna* di masyarakat agraris kabupaten Buton.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan secara porposif dengan alasan bahwa kepemimpinan elit politik khususnya kepemimpinan elit non formal di kabupaten Buton masih dijumpai dan tetap terpelihara dalam transformasi nilai-nilai budaya *sarapatanguna* terhadap pembangunan di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan elit politik dalam tranformasi nilai-nilai budaya kesultanan Buton *sarapataanguna* di masyarakat agraris, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah elit politik dan khalayak yang terlibat dalam proses penyampaian pesan nilai-nilai budaya *sarapataanguna* di Kabupaten Buton. Komunikator yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berkontribusi secara efektif dalam penyampaian pesan-pesan tentang tranformasi nilai-nilai budaya *sarapataanguna* di masyarakat agraris.

Subyek merupakan keseluruhan objek atau fenomena yang dilakukan atau dikerjakan pada suatu penelitian.. Dalam kaitan dengan hal itu, maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini terdiri dari pejabat eksekutif yakni Bupati, Kepala SKPD, dan Lurah (Kepala Desa). Legislatif,yakni DPRD elit partai, (Ketua Partai Politik) tokoh masyarakat (*Parabela dan Bonto*) yang ada di 7 kecamatan kabupaten Buton, kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Pasar Wajo, Wabula, Wolowa, Kapuntori.

Agar mencerminkan bahwa penelitian ini lingkupnya kabupaten Buton maka teknik penentuan besarnya informan menggunakan sebaran wilayah sehingga masing-masing kecamatan ada yang menjadi informan sebagai representatif masyarakat kabupaten Buton secara keseluruhan. Meskipun demikian dalam penentuan besarnya informan yang paling penting adalah informan yang memahami benar apa yang menjadi tujuan penelitian. Karenanya dalam menentukan besarnya informan dari setiap kecamatan jumlahnya tidak sama karena sangat ditentukan intensitas pergerakan para elit.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, tidak layaknya sama penelitian ilmu sosial lainya, karena jika dikaitkan dengan permasalahan dalam kajian, maka dengan sendirinya hanya dapat menggunakan model *snowball*. Model *snowball* (model bola salju) dimaksudkan dalam penentuan informan peneliti tidak mengetahui secara keseluruhan dari informan yang ditetapkan. Peneliti hanya mengetahui satu atau dua orang saja dari informan dari masing masing wilayah, yang selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan diketahui, peneliti menanyakan siapa lagi diluar dia (informan yang telah diwawancarai) yang memahami banyak atau yang bisa memberikan keterangan dengan substansi penelitian yang diharapkan. Jadi pada prinsipnya model snowball adalah bersumber dari informan yang sedikit atau kecil dan menggelinding yang kemudian ber-kembang semakin lama semakin banyak atau besar, demikian pula pertanyaanya mulai dari pertanyaan kecil / sedikit yang kemudian semakin berkembang. Selain itu juga dalam penelitian yang bersifat snowball, bahwa yang menjadi informan berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah mereka yang mengetahui dan dapat memberikan jawaban yang akurat pada saat dilakukan wawancara terkait dengan pergerakan para elit disetiap wilayah karena sifatnya wawancara mendalam (*deept interview*).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan melalui *guidance interview*, wawancara mendalam, dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui analisis nilai-nilai budaya *sarapatanguna*, berupa dokumen, naskah. buku, jurnal dan publikasi dari lembaga terkait.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka atau jumlah pada objek penelitian tertentu. Data kualitatif adalah data yang mendekripsikan dan menganalisis gejala-gejala sosial, budaya, dan politik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kaitanya dengan penelitian ini, meskipun tetap menggunakan data kuantitatif tetapi tujuanya adalah hanya untuk melengkapi dan menguatkan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara mendalam (deep interview) dan observasi yang dilakukan. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari data primer yaitu hasil-hasil wawancara yang dianalisis secara mendalam dengan menggunakan peralatan pedoman wawancara, hasil-hasil pengamatan, dokumentasi dan terutama data hasil FGD (focus Group Discussion) yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini menggunakan FGD bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari masyarakat terkait dengan substansi penelitian.

Pengumpulan data dalam penulisan disertasi ini, bersumber dari data primer dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (deep interview) observasi, focus group discussion dan dokumentasi. Wawancara mendalam terutama dilakukan pada informan kunci dan informan pokok. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data threeangulation, menggabungkan beberapa konsep dan cara agar diperoleh data yang obyektif. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi, focus group disscussion. Untuk mengumpulkan data nilai-nilai budaya *sarapatanguna*, dan kepemimpinan elit poltik terhadap transformasi nilai-nilai budaya sarapataanguna di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk memperkuat data primer penulisan desertasi ini juga menggunakan data pendukung yang bersumber dari hasil penelitian berupa buku, jurnal, karya ilmiah, naskah atau dokumen sebagai data sekunder.

Pengumpulan data primer. Peneliti menggunakan instrument berupa buku catatan lapangan, panduan wawancara (*interview guide*) sebagai pedoman peneliti yang secara khusus diajukan kepada informan kunci dan informan pokok yang ditetapkan. Selain itu juga panduan wawancara sebagai pedoman peneliti yang diajukan kepada informan pokok yang ditetapkan berdasakan model snowball. Sebagai sarana pen-dukung dalam penggalian informasi terkait data yang dibutuhkan, peneliti memanfaatkan tape recorder dan kamera (MP6) demi terdokumentasinya data untuk kebutuhan perumusan hasil penelitian, Selain data pimer, peneliti juga membutuhkan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui media massa, hasil-hasil penelitian, dokumen, dokumnetasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif, melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:19-21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan Komunikasi Elit Politik dalam Melaksanakan Transformasi Nilai-Nilai Budaya *Sarapataanguna* dalam Masyarakat Agraris Kabupaten Buton

Elit politik di kabupaten Buton dalam menyampaikan pesan pesan pembangunan dalam transformasi nilai - nilai budaya *sarapataanguna* melalui beberapa jaringan.

Jaringan Lembaga Formal

Elit mentransformasi pesan-pesan melalui perangkat birokrasi. Bupati, lurah atau kepala desa dalam menyampaikan pesan-pesan tentang program pembangunan melalui *Multi-Step Communication* kepada masyarakat.

Jaringan Lembaga non Formal.

Elit menstranformasi pesan-pesan pembangunan melalui perangkat lembaga adat kabupaten Buton khususnya di tujuh kecamatan melalui tradisi pesta panen atau pesta adat. Pesta adat/pesta panen merupakan tradisi masyarakat Buton dari zaman kesultanan sampai saat ini masih berlangsung. Komunikasi bathiniah dengan sang Pencipta, dimana sang Pencipta telah menganugrahkan suatu musim tanam masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mengungkapkan rasa syukur dengan membawa sesajian di baruga /*galamp*a atau balai pertemuan, yang didahului upacara ritual seorang *parabela* sebagaimana yang terjadi di baruga Awainulu, dimana para elit politik turut hadir. Disini bupati sebagai elit menyampaikan pesan-pesan pembangunan, sekaligus pesan-pesan politik untuk senantiasa mendukung program pembangunan dari Pemda Tk II kabupaten Buton.

Dalam sejarah Kesultanan Buton seorang pemimpin politik tidak hanya mempunyai kompetensi jasmaniah menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dan sistem kemasyarakatan, tetapi merekaharus menguasai kompetensi spiritual melalui pendekatan tasawuf, seperti para sultan di Buton. Kepemimpinan politik di Buton khusunya para sultan diwajibkan harus menguasai dan memililiki kompotensi spiritual. Berdasarkan literatul sejarah seperti yang di ungkapkan La Makki dalam wawancara 26 November 2018.

Untuk menjadi seorang sultan pemimpin politik dari elit kaoumu mempelajari ilmu tasawuf. Ada yang mempelajari dari kitab-kitab tarekat, ulama tasawuf, maupun mereka lansung belajar ke tanah arab. Besarnya perhatian penguasa kesultanan Buton tehadap ajaran tasawuf dapat memperkuat karisma, wibawa, wewenang dan struktur oragnisasi kekuasaan. Karisma Sultan yang sekaligus dipandang sebagai sufi menjadi kuat karena mereka diyakini oleh rakyat sebagi orang yang memiliki "keramat" berkedudukan sebagai "syekh" dan sebagai manusia sempurna.

Demikian pula Yunus (1995) menjelaskan wewenang golongan penguasa dalam kekuasaanya menjadi kuat karena mereka memiliki, disamping garis keturunan yang sah untuk berkuasa (kaoumu), juga mereka adalah hasil posedur pemilihan adat. Legalitas garis keturunan kaoumu untuk memegang kekuasaan diperkuat oleh keyakinan masyarakat bahwa mereka menduduki tiga tingkatan atau martabat "ilahiyya" yang *qadim* dari tujuh tingkat dalam ajaran tasawuf "martabat tujuh". Dan legalitas hasil pemilihan sultan diperkuat oleh sistem pemilihan yang didasarkan pada selain musyawarah dan tradisi, juga unsur zikir dan khalwat, unsur-unsur yang ada dalam dunia tasawuf. Karena sebelum sultan terpilih dinyatakan sah terlebih dahulu "dukun kerajaan" melakukan zikir dan khalwat di mesjid keraton untuk memperoleh persetujuan dari Tuhan. Wibawa sultan yang menduduki

jabatan dari hasil sistem pemilihan karena keutamanya yang menonjol yakni sebagai ulama dalam bidang tasawuf khususnya dalam tarekat Khawaltiyah Sammaniyyah. Kuatnya organisasi kesultanan antara lain disebabkan antara sultan dan seluruh perangkat kesultanan memiliki ikatan dalam struktur kekuasaan, juga ikatan struktur tarekat. Oleh karena itu, sultan dipatuhi disamping sebagai penguasa tertinggi dalam bidang politik, juga sebagai syekh tarekat.

Berdasarkan realitas di lokasi penelitian bahwa nilai-nilai kepemimpinan masa lalu kesultanan Buton masih dipertahankan dan dipraktekan oleh sosok seorang *parabela* atau *bonto*. Parabela atau bonto adalah seorang opinon leader yang menjadi pangutan masyarakat di Kabupaten Buton. Bahkan ketokohan mereka melebihi ketokohan seorang bupati dalam era otonomi daerah saat ini. Demikian pula yang dikemukakan Rogers, bahwa didalam masyarakat ada pemuka-pemuka pendapat yang selalu di mintai ide-ide dan nesehat dan mereka ditokohkan didalam masyarakat tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kapasitas pemuka pendapat dapat memgambil keputusan - keputusan yang diperlukan oleh masyarakat. Penyebaran informasi tentang revitalisasi nilai-nilai budaya Buton dalam masyarakat diadopsi oleh opinion leader kemudian disaring dan didiskusikan oleh kelompok–kelompok masyarakat dan diimplementasikan dalam upacara ritual dan adat terutama dalam pesta panen dimasyarakat Kabupaten Buton.

Dalam penelitian ini terbentuknya jaringan komunikasi dimulai aktor atau elit melakukan transfer informasi kepada khalayak mengenai program–program pembangunan daerah di masyarakat. Pesan-pesan tersebut mengalir dari satu sumber kesumber lain dan dari komunikant ke komunikant lainya. Dalam studi jaringan yang dikemukakan Berlo bahwa jaringan komunikasi mengarah pada prilaku komunikasi dimana dalam komunikasi interpersonal ada aktor yang disebut pemuka pendapat (*opinion leader*) yang mempunyai pengikut-pengikut dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jaringan yang terbangun adalah diskusi-diskusi interpersonal antara bupati sebagai penguasa wilayah dan aparat kelurahan selaku pelaksana program antara warga yang menerima program pembangunan dalam melestarikan nilai-nilai budaya Buton.

Diskusi juga diperbincangkan di tingkat kadie yang dipimpin oleh *parabela* dan bersama perangkat *kadie*. Hal tersebut menarik untuk ditelusuri didaerah penelitian ini, karena di era otonomi daerah antara lembaga formal dan non formal berjalan seirama.

Fakta yang terjadi dilokasi penelitian bahwa kepala adat *parabel*a dan *bonto* memimpin wilayah kadie yang punya otonomi untuk mengurus wilayah kekkuasaanya tanpa campur tangan elit politik formal (bupati). Peristiwa yang terjadi diwilayah *kadie* dan masih dipertahankanya kepemimpinan *parabela* menandakan bahwa sebahagian nilai-nilai budaya kesultanan Buton masih diterapkan dan dipertahankan di era otonomi daerah sekarang ini. Mencermati proses pemindahan pesan maka model jaringan lingkaran dan model jaringan bebas yang banyak digunakan dalam revitalisasi nilai -nilai budaya sarapatanguna di kabupaten Buton. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalir dari aktor ke kelompok - kelompak organisasi dan diperbincangkan di tingkatan kadie atau kampung.

Dari wawancara dan pengamatan penulis di wilayah *kadie* yang dipimpin *parabela* di dua kecamatan yakni; Pasar Wajo, Wabula, dan tiga kecamatan yang dipimpin oleh *bonto* yakni: Wolowa, Siotapina dan Lasalimu mempunyai

peran dan kewenangan yang sama yakni sebagai pimpinan adat di wilayah *kadie*. Di zaman kesultanan, seorang sultan menempatkan *kaoumu* dan *walaka* dibeberapa *kadie* untuk menjadi pucuk pimpinan atau "raja–raja kecil" di *kadienya* masing-masing. Untuk *walaka* disebut *bonto* dan *parabel*a dan *kaoumu* disebut *bobato*.

Keluarga.

Elit politik pada masa-masa tertentu melakukan komunikasi dengan kelompok keluarga melalui anjang sana. Pola komunikasi merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Predikat manusia sebagai mahkluk sosial sudah sepantasnya melakukan interaksi komunikasi dengan orang lain untuk tukar menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, membagi pengalaman, bekerjasama dengan orang lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain merupakan isyarat bahwa seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus kerjasama dengan orang lain. Melalui kegiatan komunikasi, ungkapan kebutuhan yang diinginkan dapat tersalurkan kepada sesamanya.

Kebutuhan berkomunikasi selalu didorong untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan keberlangsungan hidup, mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang rumit dan kompleks. Dalam setiap konteks kehidupan manusia dimuka bumi, mulai dari kehidupan keluarga primitif sampai kehidupan keluarga modern, kehidupan masyarakat perdesaan sampai masyarakat perkotaan yang bergaya modern tidak pernah luput dari kertegantungan dengan orang lain. Setiap individu selalu mengharapkan kehadiran orang lain dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Untuk itu setiap individu pasti melakukan hubungan komunikasi dengan sesamanya demi untuk menyalurkan pikiran, harapan, perasaan, keinginan dan lain sebagainya. Pola komunikasi dalam konteks kehidupan masyarakat petani dan keluarganya di perdesaan dilakukan dengan cara-cara yang sederhana dengan menggunakan simbol bahasa sebagai saluran untuk menyampaikan harapan dan keinginannya dalam anggota keluarga.

Pola jaringan komunikasi yang dilakukan elit yang terjadi dalam keluarga petani dilihat dalam konteks melakukan kegiatan usaha tani mereka pada umumnya menggunakan pola-pola komunikasi primer. Hal ini karena sesuai dengan konteks peristiwa komunikasi terjadi dalam keluarga, maka komunikasi yang terjadi pasti akan mencirikan komunikasi primer. Ciri pola komunikasi primer pada prinsipnya adalah pola penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan atau lebih untuk penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan non-verbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain se-bagainya) termasuk pelaksanaan nilai–nilai budaya *sarapatanguna* yang secara langsung dapat/ mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Komunikasi akan berlangsung apabila terjadi kesamaan makna atas pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses membuat pesan yang setara bagi komunikator dan komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama-tama komunikator menyandi *(encode)* pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan

pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian giliran komunikan untuk menterjemahkan *(decode)* pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertian. Hal yang penting dalam proses penyandian *(coding)* adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat kesamaan makna).

Jaringan elit pada pembahasan tentang keluarga sebagai saluran penyampaian pesan bidang pertanian tanaman pangan khusnya pada usahatani tanaman padi, jagung dan kacang tanah, cara berkomunikasi penyampaian pesan bidang pertanian tanaman pangan yang terjadi dalam keluarga petani diButon umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah lain.

Cara berkomunikasi dalam keluarga petani dilakukan melalui pola-pola hubungan sosial dan kekerabatan yang bersifat intim, spontanitas, dan biasanya orang tua menjadi sumber informasi dalam membicarakan urusan pertanian demi keberlangsungan hidup keluarga. Keberlansungan hidup keluarga petani dilakoni melalui aktifitas berusahatani skala kecil dengan memberdayakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja inti yang tidak pernah luput dari aktifitas komunikasi. Dalam konteks kehidupan keluarga petani dalam melakoni aktifitas berusahatani yang didukung oleh kekuatan sumber daya keluarga, baik dari aspek tenaga kerja, permodalan, sampai pada aspek pemasaran produksi hasil usahatani, dilakukan melalui perencanaan yang sederhana dengan menggunakan pola-pola hubungan komunikasi tatap muka (primer). Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan usahatani tanaman pangan tidak luput dari kegiatan aktifitas dan tindakan komunikasi dalam keluarga. Karena keterlibatan anggota keluarga merupakan salah satu syarat untuk menunjang keberhasilan pekerjaan usaha tani, maka komunikasi antara sesama anggota keluarga terutama penyampaian pesan-pesan budaya sarapatanguna tentang pengolahan lahan sampai pada tahapan pemanenan produksi hasil usahatani mutlak harus dilakukan.

Hal tersebut diatas, sejalan dengan teori jaringan yang dikemukakan oleh Berlo (1996) bahwa jaringan komunikasi adalah pengembangan "How say to whom" dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal, dimana terdapat aktor yang dalam komunikasi disebut *opinion leaders*. Dalam konteks komunikasi yang terjadi dilokasi penelitian ini, bahwa jaringan komunikasi dimulai dari elit dengan menggunakan lembaga formal sebagai saluran untuk menyampaikan pesan pembangunan. Saluran formal lembaga kelurahan, balai penyuluh pertanian dianggap efektif oleh elit, karena lembaga ini merupakan wahana untuk berinteraksi dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan atau keluhan, serta ide-ide masyarakat disalurkan melalui lembaga ini. Berdasarkan pengamatan penulis balai kelurahan difungsikan sebulan sekali untuk menjaring informasi ditingkat RW dan RT di kelurahan kabupaten Buton.Dalam komunikasi tersebut terbentuk *Multi Step Communication*, dimana elit seperti bupati hanya menyampaikan pesan kepada kepala kelurahan, kepala desa, dan penyuluh pertanian, dan selanjutnya kepala kelurahan yang akan menyampaikan kepada warga masyarakat tentang program pembangunan yang ada di wilayah pedesaan atau kelurahan. Pada lembaga non formal jaringan komunikasi elit dilokasi penelitian ini adalah peran seorang elit hanyalah sebuah symbol yang diwakilkan kepala adat atau *parabela*. Peran kepala adat sangat kuat

dan tidak bisa diintervensi oleh elit politik. Hal tersebut disebabkan latar belakang sejarah sejak terbentuknya kesultanan Buton, dimana wilayah *kadie* adalah dipimpin oleh seorang kepala kampung atau kepala *kadie* yang disebut *parabela* atau *bonto* yang mempunyai struktur pemerintahan sendiri didalam mengelola wilayahnya, dan sampai saat ini struktur kepemimpinan *parabela* dan *bonto* masih bertahan dilokasi penelitian ini. Dalam studi jarinagan komunikasi yang telah dikemukan oleh Berlo (1996), bahwa interaksi komunikasi berjalan melalui jaringan sosial yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok masya-rakat dalam memenuhi kebutuhan komunikasi baik yang dilakukan oleh actor-aktor dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu issu tertentu yang terjadi dalam suatu sistem sosial.

Dalam konteks komunikasi dilokasi penelitian khususnya pada lembaga non formal bahwa elit politik mengalami hambatan didalam mentranformasi langsung pesan kepada khalayak, terutama pesan-pesan budaya, karena peran *parabela* yang sangat kuat, sehingga masyarakat lebih percaya apa yang disampaikan *parabel*a daripada elit politik.

Terbentuknya jaringan-jaringan komunikasi antara elit politik dan masyarakat Buton baik dilembaga formal maupun non formal didasarkan pada fakta emperis, bahwa kesadaran elit politik untuk melestarikan nilai-nilai budaya Buton diwujudkan dalam pesan-pesan: *po-maa-maasiaka* artinya kasih-mengasihi satu sama lain atau hidup saling-mengasihi terhadap sesama. Pesan in teridentifikasi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Buton, ketika hasil pertanian telah dipanen mereka mengadakan acara syukuran dengan mengajak handaitaulan dan keluarga serta masyarakat untuk acara pesta rakyat, membagikan jasil panen kepada para tetangga dan sebagain hasil panen dijual kepasar. Nilai budaya *po-maa-maasiaka* yang dilakukan oleh elit politik dilokasi penelitian teridentifikasi dengan saling-mengunjungi atau yang dikenal dengan istilah saai ini blusukan. Elit politik mendatangi masyarakat di Kecamatan Pasar Wajo, Siotapina untuk mengunjungi petani, melihat kinerja petani merupakan ikatan emosional antara elit dengan masyarakatnya. Nilai budaya *po-piapiara*, tenggang rasa saling memelihara/saling mencintai, teridentifikasi bahwa elit politik tidak mengintervensi atau mencampuri urusan pertanian dimasyarakat, petani bekerja dengan kearifan lokal dengan mengsinergikan inovasi teknologi baru, elit politik berfungsi sebagai motivator dan hanya meminta pertanggungjawaban tugas melalui kepala dinas pertanian. Nilai budaya *pomae-maeka*, saling merasa takut atau saling menghormati antar sesama, teridentifikasi dilokasi penelitian datang kesawah tepat waktu, tidak terlambat, hasil kerja maksimal. Nilai budaya *po-angka-angkataka*, saling menghargai dan saling mengutamakan. Teridentifikasi dilokasi penelitian, masyarakat mempunyai keahlian dalam mengolah lahan dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dan hasil pertanian masyarakat meningkat. Pemerintah kabupaten Buton sebagai elit politik berusaha keras untuk meningkatkan kinerja dinas pertanian dalam membina masyarakat tani di seluruh kecamatan, kelurahan dan desa. *Po-bhinci-bhinciki kulli*, saling mencubut kulit kalau terasa kulit sakit begitupula orang lain terasa sakit. Teridentifikasi, elit politik di kabupaten Buton tidak sembarangan mencopot posisi penyuluh pertanian sebagai ujung tombak terdepan.

Implementasi nilai-nilai budaya Buton *sarapataangun*a yang pernah diterapkan sebagai undang-undang di Kesultanan Buton dimasa silam, telah mem-

bangkitkan kesadaran elit dan masyarakat Buton untuk mengangkat kembali nilai-nilai tersebut dalam wujud kehidupan masyarakat merupakan suatu fenomena baru modern yang muncul didalam masyarakat Buton bahwa nilai budaya Buton masih dirasakan penting untuk menghidupkan rasa, karsa terhadap mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian.

Revitalisasi nilai budaya *sarapataanguna* dalam kehidupan masyarakat Buton yang ditunjukan oleh prilaku elit dalam merespons realitas simbol budaya yang hidup dalam masyrakat Buton sejalan dengan refleksi pemikiran Husel dalam teori fenomenologi yang menunjukan bahwa tindakan sosial elit dan khalayak merupakan ssuatu yang bermakna dalam merekontruksi pola komunikasi dalam kehidupan sosial. Pola interaksi komunikasi antara elit dan khalayak telah melahirkan kesadaran, bahwa masyarakat Buton sebagai bagian pelaku budaya untuk bersama–sama melestarikan nilai-nilai budaya *sarapataanguna* sebagai pedoman dalam bertindak dan berprilaku didalam kehidupan masyarakat. Adanya resistensi sebagaian dari generasi muda yang menganggap bahwa budaya yang berkembang saat ini sudah harus dirubah untuk menyesuaikan dengan keadaan globalisasisi juga terjadi dilokasi penelitian. Perlawanan generasi muda yang terjadi di Lawele kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton pada bulan Oktober 2018 yang menginginkan acara hiburan muda mudi diikutkan dalam pesta adat merupakan kehawatiran bahwa nilai budaya Buton terancam punah dan terkikis oleh budaya modern. Tampilnya kesadaran bersama antara elit dan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya Buton merupakan perpaduan ide dan gagasan dan menyebar dalam jejaring komunikasi yang terjadi dalam penelitian ini. Begitu juga perlawanan masyarakat dan toko-tokoh adat terhadap penyimpangan nilai–nilai *sarapataanguna* yang dilakukan elit politik Umar Samiun dengan menggunakan nilai-nilai budaya Buton sebagai standar ganda dalam kepentingan politik. Elit menggunakan istilah *pasalli* dengan menghamburhamburkan uang didepan publik sebagai perhatian terhadap rakyatnya. Tetapi *passalli* dalam budaya Buton harus didudukkan dalam nilai-adat dan tradisi yang secara turun-temurun dipraktekkan dalam acara tradisi *pakande-kandea*. (makan-makan).

Melihat apa yang terjadi dalam jejaring komunikasi pada di lokasi penelitian ini maka setidaknya ada lima model jaringan komunikasi yang mendukung tersebarnya nilai-nilai budaya sarapatanguna yakni: model lingkaran, model roda, model Y, model rantai dan model bintang. Dalam pertemuan yang dilaksanakan dalam kelompok primer lebih dominan meng-gunakan model Y dimana elit lokal seperti parabela dan bonto sebagai pemimpin pertemuan, tetapi satu anggota lain berperan sebagai pemimpin kedua namun *Parabela* atau *Bonto* sebagai pengambil keputusan. Adapun dalam pertemuan dalam kelompok sekunder lebih cendurung menggunakan model bintang (semua saluran) dimana dalam pertemuan tidak terpusat hanya pada satu orang pemimpin yaitu parabola atau bonto tetapi semua anggota dapat memberikan masukan dan saran dalam melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya sarapatanguna di masyarakat buton. Dalam pertemauan kelompok tersebut disampaikan pentingnya nilai-nilai *po-maa-maasiaka, popia-piara, pomae-mayaka, po–angka-angkataka* sebagai warisan nilai budaya kesultanan buton untuk diterapkan. Dari temuan penelitian tersebut diatas sejalan dengan pendapat Devito dalam Husain (2013) menyatakan bahwa terdapat lima pola jaringan komunikasi dalam dinamika kelompok

yakni pola komunikasi lingkaran, roda, Y, rantai dan pola komunikasi bintang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, jaringan komunikasi yang di lakukan elit politik dalam melaksanakan revitalisasi nilai-nilai budaya kesultanan Buton *sarapataanguna* di masyarakat kabupaten Buton adalah: Jaringan lingkaran, jaringan bebas, Jaringan Y dan jaringan bintang.

Adapun jaringan-jaringan tersebut teridentifikasi melalui (1) jaringan lembaga formal. Jaringan lingkaran terjadi antara masyarakat dan elit secara bebas untuk melakukan komunikasi. Bupati, Lurah, Kepala Desa menyampaikan pesan-pesan pembagunan melalui *Multi Step Communication*; (2) jaringan lembaga non formal**.** Jaringan Y yang lebih dominan dalam pertemuan. *Parabela* atau *Bonto* sebagai pemimpin pertemuan dan yang lain berperan sebagai pemimpin kedua akan tetapi *parabela* atau *bonto* sebagai pengambil keputusan; (3) keluarga, jaringan yang digunakan adalah jaringan bintang. Semua level dapat berkomunikasi langsung, tidak hanya terpusat satu orang pemimpin saja tetapi semua anggota masyarakat dapat memberikn masukan dan saran dalam melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya *sarapataanguna*. Elit politik pada masa-masa tertentu melakukan komunikasi dengan kelompok keluarga melalui anjang sana.

DAFTAR PUSTAKA

Addin, A. et al. (2011). *Stratifikasi Masyarakat Butuni Pada Masa Kesultanan.* Baubau: Yayasan Fajar Al Buthuuni.

Anderson, J. E. (1979). *Public Policy and Polities in America.* California: Wadsworth, Inc. Belmont.

Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian.* Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta

Bagea, I., (2015). *Implementasi Nilai Budaya Buton Dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Baubau.* Journal Kandai Volume 12. No.2 November 2016 Halaman 297 – 308.

Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Baja, S. (2012). *The Sleeping Giant Buton Raya Isyarat Ilmiah Menguak Tabir Tujuh.* BauBau: Puslitbang Witaris UNHAS Pemerintah Kota Bau Bau. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. 2015. *Kabupaten Buton dalam Angka*. Baubau: Kainawa

Bhatta, G. (1996). *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capascity is Meaningless.*

Bennis, W. & Nanus, B. (1990). *Kepemimpinan: Strategi dalam Mengembangkan Tanggung Jawab.* Jakarta: Prenhallindo.

Bennis, W. & Nanus, B. (2003). *Leaders, Strategies for Taking Charge,* New York: Harper Collins Publisher.

Bulaeng AR. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Hasanuddin University Press. Makassar.

Beerel, A. (1996). *Smart Strategies, Leadership Through Strategic Planning,* New York: International Thompson Business Press.

Berlo, D.K. (1960). *The Process of Communication: An Introduaction to Theory and Practice.* United State of America.

Ciulla, J.B. (2003). *The Ethics of Leadership,* Singapore: Replika Press.

Clarke, T. & Clegg, S., (1998). *Changing Paradigms; the Transformation of Management Knowledge for the*

21st Century, London: Herper Collins-Business.

Cresswell. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Cangara, H. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikas*i. PT Raja Grafindo, Persada Jakarta.

Ding, D., et al. (2012). Relationship of servant leadership and employee loyalty: the mediating role of employee satisfaction. *Ibusines Journal. (4): 208-215.*

Djaenuri, Aries. (2015). *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Koentjaraningrat, (1985). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.

Nurwati, et al. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Budaya Organisasi, Komitmen Kerja, Perilaku Kerja dan Kinerja Pegawai (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo Kendari

Ndraha, T. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukmadinata (2006). *Metode penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Thamrin (2015). *Implementasi Nilai-Nilai Budaya Sarapataanguna dalam mewujudkan sistem pemerintahan Good Governance* di Kota Bau-Bau.

Yunus, AR. (1995). *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad 19.* Seri INIS Jilid 24. Indonesia - Netherlands Cooeperation in Islamis Studies. Jakarta.